

SKRIPSI

**KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA ERECINNONG KECAMATAN
BONTOCANI KABUPATEN BONE**

Disusun dan Diajukan Oleh:

RISAL TANJUNG

Nomor Stambuk : 105641115116



03/09/2021

1 exp.
smb-Alumni

R/0088/19M/21 CD
TAN
Ri

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA ERECINNONG KECAMATAN
BONTOCANI KABUPATEN BONE**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan di Desa Erecinnong
Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Risal Tanjung

Nomor Stambuk : 105641115116

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Mulyar, M.Si


Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730.727


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM : 103.1102

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis 26 Agustus 2021 :



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)
2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Risal Tanjung

Nomor Stambuk : 10564 1115116

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 3 Maret 2021

Yang Menyatakan

Risal Tanjung

ABSTRAK

Risal Tanjung. 2021. Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone yang di bimbing oleh Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku pembimbing II.

Koordinasi merupakan salah satu penghambat pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Latar Belakang yaitu pembangunan infrastruktur jalan pemerintah Desa Erecinnong belum dengan maksimal melakukan koordinasi, termasuk dengan masyarakat. Tidak terjalannya koordinasi yang baik pada pemerintah dengan masyarakat, sehingga menjadi pemicu terhambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Seharusnya pemerintah Desa Erecinnong menyadari pentingnya peran masyarakat jika ingin melakukan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Jenis penelitian adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Jumlah informan penelitian adalah 9 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, analisis data dan klarifikasi data. Peneliti menggunakan 3 indikator koordinasi pemerintah desa yaitu kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi. Tahap Kerjasama yaitu pada indikator kerjasama pemerintah Desa Erecinnong sudah melakukan kerjasama pada pihak BPD, LPM, dan juga mengusahakan terjalinya kerjasama dengan LKPD maupun Perseroan terbatas (PT). Tahap Kesatuan Tindakan yaitu mengenai indikator kesatuan tindakan pemerintah dan masyarakat Desa Erecinnong telah bersatu untuk melakukan tindakan tapi belum maksimal, karena cuma sebagian saja masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan jalan di Desa Erecinnong. Tahap Komunikasi yaitu pada indikator komunikasi tentang koordinasi pemerintah dengan masyarakat belum maksimal dikarenakan masih ada masyarakat belum mengetahui apa yang akan dilakukan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong. Padahal pemerintah di Desa Erecinnong sudah menyampaikan kepada sebagian masyarakat saja. Sehingga koordinasi pada indikator komunikasi pemerintah dengan masyarakat tidak terjalain dengan maksimal.

Kata Kunci : *Koordinasi, Pembangunan , Infrastruktur Jalan*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun dalam prosesnya penelitian mendapat hambatan dan tantangan, namun itu semua tidak mematahkan semangat dan perjuangan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Amir Muhiddin, M.Si Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dra. Hj, Sitti Nurmaeta, MM selaku penasehat akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Rasyid dan Ibu Hamsinah yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, dan memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moral ataupun materi dan tak lupa kasi sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak Kantor Desa, staf, dan masyarakat Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone yang telah membantu saya dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 016, terima kasih saling membantu selama kurang lebih 4 tahun ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT dan oleh karena itu demi

kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Juni 2021

Penulis,

Risal Tanjung
NIM : 105641115116



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Konsep Koordinasi Pemerintahan.....	14
1. Definisi Koordinasi.....	14
2. Definisi Pemerintah Desa.....	17
3. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan.....	19
4. Tujuan Koordinasi.....	22
5. Indikator Koordinasi.....	23
C. Konsep Pembangunan.....	25
D. Konsep Pembangunan Desa.....	27
E. Konsep Infrastruktur.....	29
F. Kerangka Pikir.....	32
G. Fokus Penelitian.....	33
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian.....	42
1. Kondisi Infrastruktur Jalan Desa Erecinnong.....	43
2. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bone.....	47
3. Gambaran Umum Desa Erecinnong.....	47

B. Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone	52
1. Tahap Kerjasama.....	54
2. Tahap Kesatuan Tindakan.....	61
3. Tahap Komunikasi.....	64
C. Kendala Dalam Pembangunan Infastruktur Jalan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone	67
1. Keterbatasan anggaran atau dana.....	68
2. Kurangnya keterbatasan masyarakat.....	71
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
 DAFTAR PUSTAKA	82
 LAMPIRAN	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Kabupaten Bone berbatasan dengan daerah-daerah	43
Tabel 4.2 Pembagian Luas Wilayah Kecamatan (Km ²) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Jenis Kelamin Di Kabupaten Bone 2020.....	46
Tabel 4.4 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bontocani tahun 2020.....	47
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Erecinnong Berdasarkan tahun 2020.....	49
Tabel 4.6 Sarana Pendidikan Yang Ada Di Desa Erecinnong.....	50
Tabel 4.7 Fasilitas yang Ada di Desa Erecinnong.....	50
Tabel 4.8 APBD Desa Erecinnong.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kewenangan diserahkan ke desa dari sentralisasi (pada jaman pemerintahan orde baru) menjadi desentralisasi, esensi dari desentralisasi ini melahirkan otonomi desa sebagaimana dikenal pada masa sekarang ini. Pemerintah desa diberikan kemudahan melalui bantuan dana desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa sebagai langkah konkret upaya pembangunan desa. Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan beberapa hal antara lain yang mengatur tentang ketentuan umum desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, dan keuangan desa. Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 114 mengenai pembangunan desa, dimana salah satu kewenangan kepala desa yaitu mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.

Pembangunan pada dasarnya sebagai upaya yang terencana dan terprogram secara terus menerus oleh satu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan-perencanaan dan pelaksanaan perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan ini merupakan langkah menuju masyarakat baik itu dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan maka dari itu pemerintah dituntut agar lebih memperhatikan hal-hal ini salah satu pentingnya pembangunan ini ialah pembangunan fisik dimana pembangunan fisik ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian masyarakat seperti pembangunan jalan dan proses pelayanan bagi masyarakat yakni kantor desa ini sangat diperlukan untuk kelancaran proses pelayanan administrasi bagi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari aparat pelaksana pembangunan.

Desa yang lebih tertata diberbagai aspek bisa membuat masyarakat merasakan berbagai fasilitas umum dan fasilitas publik lebih nyaman. Berbeda halnya dengan desa yang tidak memiliki penataan yang baik, masyarakat menjadi tidak nyaman dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Perubahan pembangunan di desa, bisa membuat kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Hal itu dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat pun menjadi meningkat dan berkurangnya jumlah masyarakat yang menganggur. Sehingga masyarakat pun bisa sejahtera hidupnya dan ekonominya menjadi layak.

Koordinasi salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksana pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekungan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis.

Dengan adanya pembangunan Infrastruktur yang layak bisa digunakan untuk melancarkan kegiatan ekonomi yang ada di Desa sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga dipercepat prosesnya dan pelaksanaan. Pembangunan ekonomi yang cepat diselesaikan di berbagai kegiatan, sehingga jika ekonomi tumbuh pesat maka kegiatan ekonomi di dalamnya pun bisa berjalan dengan lancar.

Koordinasi kepala desa dalam pembangunan desa secara partisipatif sangat diperlukan untuk terwujudnya keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di desa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembangunan, koordinasi merupakan fungsi manajemen pembangunan yang berkenaan dengan usaha penyatupaduan, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi dari program-program pembangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran secara efektif.

Koordinasi berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Kebijakan dilaksanakan tidak serta-merta melainkan ada beberapa tahapan yang harus dipersiapkan, salah satunya yaitu kesediaan implementor kebijakan, dan dalam melaksanakan kebijakan seorang implementor juga harus memiliki komitmen. Karena bagaimana mungkin suatu kebijakan diimplementasikan apabila tidak ada yang bersedia untuk mengimplementasikannya, setelah seorang implementor bersedia maka juga harus

komitmen dengan kesediaannya sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan Banyak yang berfikir bahwa transparansi sudah dilakukan dengan menyebarluaskan suatu program kepada masyarakat atau menempelkan pengumuman pada lokasi tertentu yang memungkinkan untuk dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Padahal transparansi perlu diadakan sosialisasi tentang maksud dan tujuan serta manfaat program tersebut, di perkirakan jumlah dana yang akan dipakai dan lain sebagainya yang bersifat privasi. Karena jika semua dijelaskan maka akan timbul rasa untuk ikut berperan serta dalam program tersebut (Susanto dkk, 2010).

Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat Komunikasi secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan melemahkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Jika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak terjalin dengan baik maka seringkali kali masyarakat dan pemerintah tidak sejalan serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam setiap program-program pemerintah termasuk dalam program implementasi pembangunan infrastruktur agar program tersebut terlaksana sesuai target dan hasilnya pun dapat optimal.

Kelurahan/Desa Erecinnong merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Kelurahan/Desa Erecinnong mempunyai luas wilayah yaitu 35,5 km bujur sangkar. Erecinnong terdiri dari dua suku kata yaitu

ere dan cinnong, ere (berasal dari bahasa konjo/makassar) artinya air, dan cinnong (berasal dari bahasa bugis) yang artinya jernih, jika di gabungkan maka memiliki arti air yang tidak pernah keruh yang timbul ditengah-tengah batu cadas. 36 Jarak ke ibu kota kecamatan 40-45 km dan jarak ke Kota Kabupaten 112 km. Kelurahan/Desa Erecinnong memiliki 3 dusun yaitu Dusun Allekkang, Kampung Baru, dan Desa Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa penduduk bekerja, hampir keseluruhan dari warga Desa Erecinnong adalah petani padi, kacang tanah, cabe dan peternak sapi. Dan tidak sedikit warga Desa Erecinnong yang merantau, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah keseluruhan masyarakat Desa Erecinnong yaitu 1.345 jiwa dengan jumlah kartu keluarga yang tercatat dalam laporan data kependudukan Erecinnong yaitu sebanyak 346 kartu keluarga (Badan pusat statistik kabupaten bone, 2016).

Pembangunan infrastruktur adalah unsur yang sangat penting karena salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya. Maka dari itu bahwa Desa Erecinnong masih tertinggal jauh dalam hal pembangunan infrastruktur hal ini diperkuat dengan melihat kondisi infrastruktur Desa Erecinnong dalam hal jalan yang hingga kini masih belum ada perubahan, serta jaringan dan listrik yang belum terealisasi hingga saat ini.

Pembangunan di Desa Erecinnong masih sangat tertinggal jauh atau bisa dibilang tidak optimal, itu dapat dilihat dari tidak terimplementasinya dengan baik beberapa infrastruktur di Desa Erecinnong khususnya dalam bidang, jalanan, listrik dan jaringan yang dianggap sangat meresahkan masyarakat padahal anggaran desa harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat meskipun transparansi masih belum

di lakukan pemerintah setempat. Harapan mereka tentang implementasi pembangunan jauh dari kenyataan. Mereka menganggap bahwa anggaran yang sudah di alokasikan untuk pembangunan belum dapat di nikmati hasilnya, terutama pada bidang jalanan, listrik dan jaringan yang sangat mereka butuhkan yang selama beberapa tahun terakhir ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Faktor utama yang menghambat pada pembangunan infrastruktur jalan pemerintah Desa Erecinnong belum dengan maksimal melakukan koordinasi, termasuk dengan masyarakat. Tidak terjalinnya koordinasi yang baik pada pemerinah dengan masyarakat, sehingga menjadi pemicu terhambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Seharusnya pemerintah Desa Erecinnong menyadari pentingnya peran masyarakat jika ingin melakukan pembangunan.

Selain itu faktor anggaran, tata kelola anggaran yang tidak sesuai rencana sehingga secara aplikatif pembangunan infrastruktur kurang lancar dan berujung pada tidak efektifnya hasil yng dicapai. Kebijakan politis pemerintah yang hanya mempekerjakan aparat desa serta kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat terkait program pembangunan di pandang sebagai faktor penghambat implememntasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong, serta tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa turut berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah.

Kondisi jalanan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone hingga saat ini hampir keseluruhan jalanan dari perbatasan Desa Watangcani hingga perbatasan Desa Samaenre itu masih belum tersentuh dengan yang namanya aspal, paving dan lain sebagainya, kondisinya masih belum ada yang berubah, masih jalanan bebatuan bercampur dengan tanah liat. Sehingga pada musim hujan alur transportasi dari Erecinnong itu sangat terhambat bahkan mobil angkutan umum (panter) dan mobil angkutan barang (trek) itu pada musim hujan tidak beroperasi dengan jumlah penduduk 1.346 (Badan pusat statistik kabupaten bone dalam angka 2016).

Konstruksi bangunan sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah bangunan, jika konstruksi sebuah bangunan baik maka bangunan tersebut akan bertahan lama (awet). Hal ini tidak terlihat pada konstruksi bangunan jalan yang ada di Desa Erecinnong (cor). Jalanan yang ada di Desa Erecinnong hanya disemen dengan tinggi sekian centi meter (tipis) sehingga setelah terkena hujan semanya sudah lulang semua dan kondisi jalannya berlobang belum lagi dilewati mobil truk sekali dua kali sudah retak dan batunya terhambur.

Akses jalan yang tidak memadai seakan menjadi momok bagi warga, dan juga akses warga untuk menjual hasil bumi terbatas. Dan terkadang pelayanan puskesmas juga terkendala untuk menjangkau pelosok di Desa Erecinnong. Karena mobil jika melewati jalan di desa itu selalu terhalang atau mogok akibat jalan berlumpur. Begitu pun dengan kurangnya interaksi atau kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat desa ercinnong bahwa dengan dilaksanakannya pembangunan jalan yang diperuntukkan buat masyarakat Desa

Erecinnong agar tidak mengeluhkan masalah jalan yang rusak dan tidak layak.

Masyarakat Desa Erecinnong harus memiliki kesadaran bahwa infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah adalah milik masyarakat dan itu merupakan tanggung jawab bersama, karena infrastruktur yang diadakan oleh pemerintah menggunakan uang rakyat. Warga juga berharap pemerintah desa agar kiranya memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan sehingga apa yang diinginkan bersama dapat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam setiap program-program pemerintah termasuk dalam program implementasi pembangunan infrastruktur agar program tersebut terlaksana sesuai target dan hasilnya pun dapat optimal.

Maka dari permasalahan diatas peneliti tertarik mengangkat judul tentang **"Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone"**. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pemerintah desa dalam melakukan pembangunan infrastruktur di desanya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu:

1. Bagaimana koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong?
2. Apa saja kendala pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini secara umum terbagi kedalam dua katagori. Katagori pertama yaitu manfaat secara akademis dan katagori kedua yaitu manfaat secara praktis. Berikut penjelasan manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa yang belum terungkap dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir mahasiswa-mahasiswa khususnya tentang berbagai konsep dan teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian tentang koorporasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam upaya pembangunan infrastruktur desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga penulis dapat melihat perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu yang kemudian akan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nur Fajriana (2014)	Koordinasi kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.	Hasil koordinasi kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dengan menggunakan indikator pada fokus penelitian Koordinasi internal dan Koordinasi eksternal, Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban sudah dilakukan melalui koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi internal dilakukan melalui koordinasi vertikal dengan aparat desa, koordinasi horizontal dengan BPD dan

			koordinasi diagonal dengan LPM, sedangkan koordinasi eksternal dilakukan dengan pihak ketiga yaitu perusahaan swasta.
2.	Jepri (2016)	Peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa Mensanak Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.	Hasil dalam peran ini Kepala Desa sudah berperan dalam meningkatkan pembangunan walaupun masih ada masyarakat yang tidak ikut keterlibatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Dalam peran kepala desa sudah berperan baik apat dilihat dari tidak adanya pembagian tugas secara khusus melainkan hanya menyesuaikan dengan saja dengan tupoksi yang ada sesuai dengan bidang masing-masing juga melihat dari kemampuan pribadi pegawai. Kepala Desa masih kurang perannya, karena masih ada masyarakat yang tidak ikut serta dalam melaksanakan pembangunan desa, kemudian masih ada juga pembangunan desa yang belum bisa diselesaikan.
3.	Bill A. Lumi, Novie R. Pioh, Alfon Kimoi	Koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan (Studi di Desa Singsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow).	Hasil Komunikasi antara pemerintah desa serta masyarakat desa Singsingon Barat sudah terselenggara dengan baik, komunikasi disini lebih mengarah kepada penyampaian-penyampaian informasi kepada masyarakat serta masukan-masukan langsung dari masyarakat tentang pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembangunan pemerintah desa singsingon barat selalu berkoordinasi terlebih dahulu bersama aparat desa dan badan permusyawaratan desa, walaupun masih ada masyarakat

		<p>yang tidak paham tentang koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa akan tetapi, koordinasi pemerintah desa sinsingon barat sudah baik, dimana dalam setiap pelaksanaan selalu melalui perencanaan yang terstruktur dan lewat komunikasi yang baik. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi dari masyarakat sangat antusias.</p>
--	--	---

Berdasarkan uraian tabel di atas mengenai penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesamaan diantaranya pembahasan mengenai koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Namun saat ini belum ditemukan penulis tentang koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa khususnya di desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian mengenai koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Hal ini dimaksudkan agar masalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat teratasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan di tahun selanjutnya. Dengan demikian pelaksanaan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan tujuan program yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pembangunan jalan atau infrastruktur.

B. Konsep Umum Koordinasi Pemerintah

1. Definisi Koordinasi

Istilah koordinasi berasal dari kata Inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait. Dengan kata lain koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Leonard D. White dalam (Inu Kencana Syafie, 2015), Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para

anggota itu sendiri (Hasibuan 2007, dalam Rohman Sudi (2017).

Menurut Mc. Farland dalam (Handayani, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Sementara itu, (Handoko 2003:195) mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Handayani dalam (Lumi, Bill A 2020) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayani juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak bisa dipisahkan satu samalain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Menurut Awaludin Djamin (dalam S.P. Hasibuan 2011:86) koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Menurut Sondang P. Siagian (1982:110) Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang

mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Menurut E.F.L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handyaningrat (dalam jurnal Septiani, Nia 2018), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Sedangkan (menurut Handoko dalam Uskono 2019) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Selanjutnya Awaluddin Djamin, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi.

Siagian (2001:110), koordinasi adalah pengaturan atau hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama pula agar pembiayaan kerja dari berbagai orang/ kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin. Namun ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur koordinasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan

bersama. Kesimpulan gabungan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu peraturan yang tertib dari kumpulan gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan.

Maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

2. Definisi Pemerintah Desa

Koordinasi Pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan negara dan garis-garis besar

haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah, Guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan.

Yang dimaksud pengendalian disini adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian karya dngan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan, diprogramkan tidak selalu cocok dengan kenyataan operasionilnya dalam rangka inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya. Selama pekerjaan berjalan, pengendalian digunakan sebagai pejaga dan pengaman. Dalam hal ini pengendalian berguna bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasionil, sehingga tujuan haluan tidak menyimpang dari rencana.

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa berwenang untuk memimpin pemerintahan desa selama

enam 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa tersebut diangkat langsung oleh kepala desa dari warga desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota.

Perangkat desa tersebut akan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa, Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian pemerintah desa di atas bahwa, kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa akan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah

Pelaksanaan untuk memantapkan pelaksanaan koordinasi, diperlukan adanya penentuan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama : Identifikasi kebijaksanaan
- b. Langkah kedua : Identifikasi fungsional
- c. Langkah ketiga : Identifikasi struktural
- d. Langkah keempat : Penentuan koordinasi material/operasional
- e. Langkah kelima : Penyusunan pola koordinasi

Mekanisme:

- a. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan.
- b. Kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- d. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah.
- e. Pembinaan wilayah yang meliputi pengelolaan batas daerah, kependudukan, catatan sipil, kehidupan bermasyarakat, peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat, kerukunan daerah, dan pelaksanaan pola hubungan kerja, antar lembaga pemerintahan di semua tingkatan, dan aktualisasi nilai-nilai pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijakan-kebijakan nasional di daerah.
- f. Pemberian fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Kebijakan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat

baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

- h. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi.

Yang dimaksud dengan pembangunan desa secara partisipatif adalah pembangunan desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat secara demokratis dan terbuka. Yang dimaksud dengan pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan partisipatif adalah pelaksanaan tugas kepala desa memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, sehingga program-program pembangunan desa yang ditetapkan dan dilaksanakan dapat efektif dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut maka efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipatif diamati dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Komunikasi dan kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa (LPM, PKK, dan lain-lain) dan berbagai unsur masyarakat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.
- b. Keterpaduan program-program pembangunan yang direncanakankan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- c. Kejelasan rencana/program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan/dilaksanakan baik dari aspek tujuan dan sasarannya maupun aspek kemanfaatannya bagi masyarakat desa.

- d. Tingkat keberhasilan (ketertiban, keteraturan, kelancaran) pelaksanaan program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan.
- e. Tingkat dukungan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan.

4. Tujuan dan Manfaat Koordinasi

Tujuan Koordinasi Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:87) Tujuan Koordinasi, antara lain: Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan.

- a. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan.
- b. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
- c. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
- d. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah sasaran organisasi atau perusahaan.
- e. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan.

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan (Handoko dalam Uskono, Nikolaus 2019). Adapun manfaat koordinasi antara lain:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuansatuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.

- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
- e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

5. Indikator Koordinasi

Hasibuan (dalam Rohman, Sudi 2017), menjelaskan ada beberapa indikator dari koordinasi, yaitu sebagai berikut:

a. Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi,

juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

b. Kesatuan tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu, sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

c. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. "Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan". Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan

pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

C. Konsep Pembangunan

Sebagaimana dinyatakan dalam pembangunan UUD 1945 bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan baik secara Nasional maupun pada daerah harus dapat manjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh Bangsa Indonesia. Sebagai wujud perlindungan terhadap seluruh Bangsa Indonesia maka pemerintah diharapkan mampu mendistribusikan pembangunan dan hasil-hasilnya secara merata kepada seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Bachtiar Effendi dalam jurnal (Laing, Everiady, 2019) Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil yang merata dan berkeadilan.

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Fajriana Nur, 2014) Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan dalam melakukan suatu perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ke arah kemajuan secara berkesinambungan untuk memenuhi

kebutuhan pokok manusia, pemerataan yang direncanakan sesuai dengan tujuan suatu bangsa.

Pembangunan secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas politik karena stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktifitas negara tersebut setiap tahunnya.

Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Sedangkan Menurut Rogers dalam RismaHandayani pembangunan masyarakat pedesaan pembangunan adalah proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*), dan membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*proferty*), kerusakan (*descruction*), tekanan (*repression*) dan aliansi (*alienation*).

Dalam pelaksanaan pembangunan maka sangat diperlukan adanya strategi-strategi pembangunan agar pembangunan itu sesuai dengan perencanaan. Perlu diingat bahwa tidak semua negara menganut strategi pembangunan yang jelas biasanya, kebanyakan negara tidak mengikuti strategi pembangunan yang dapat diidentifikasi dan sering kali berubah-ubah. Ini diakibatkan karena melemahnya peran negara di NSB, dan bisa juga akibat krisis ekonomi global. Bisa dipahami apa peranan strategi pembangunan bagi banyak negara saat ini cenderung menjawab manajemen daripada melakukan transformasi sosial ekonomi. Pada gilirannya hal ini mengurangi reverensi teori pembangunan.

D. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah suatu program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin yang merupakan suatu gerakan untuk kemajuan dalam mewujudkan masyarakat pancasila. Kansil (dalam Adri Paton, dalam (Sambiran, Sarah 2017) mengatakan pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbang kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah

wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat, memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ismawan (dalam Adri Paton, dalam (Sambiran, Sarah 2017) bahwa pembangunan desa mempunyai beberapa implikasi penting. Pertama, adanya penekanan pada kemampuan menyeluruh masyarakat desa yang berarti adalah mengembangkan kemandirian. Kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat dari hasil-hasil pembangunan tersebut. Dalam rangka menciptakan kemandirian tersebut yang terpenting adalah menumbuhkembangkan kemauan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa baik melaksanakan secara langsung dalam bentuk swadaya murni maupun swadaya gotong royong.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan desa adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana guna menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan dalam segala bidang yang dilaksanakan dalam suatu masyarakat hukum tertentu dan adanya partisipasi masyarakat desa dalam bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

➤ Undang-Undang dan Peraturan Perencanaan Desa:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Landasan Yuridis Pengembangan Otonomi Desa. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari kebijakan umum Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, yang telah dituangkan dalam berbagai Dokumen Perencanaan pembangunan desa sebagai perencanaan jangka menengah, minimal mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa, Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

E. Konsep Infrastruktur

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan

mempermudah kegiatan ekonomi. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Robert j.Kodoatie 2005:8).

Kesimpulan pengertian infrastruktur adalah sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung utama terselenggaranya proses pembangunan dalam menyediakan transportasi, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003) The World Bank membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

- a. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi.
- b. meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase).
- c. sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).

- 1) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
- 2) Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastuktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur harus berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan.

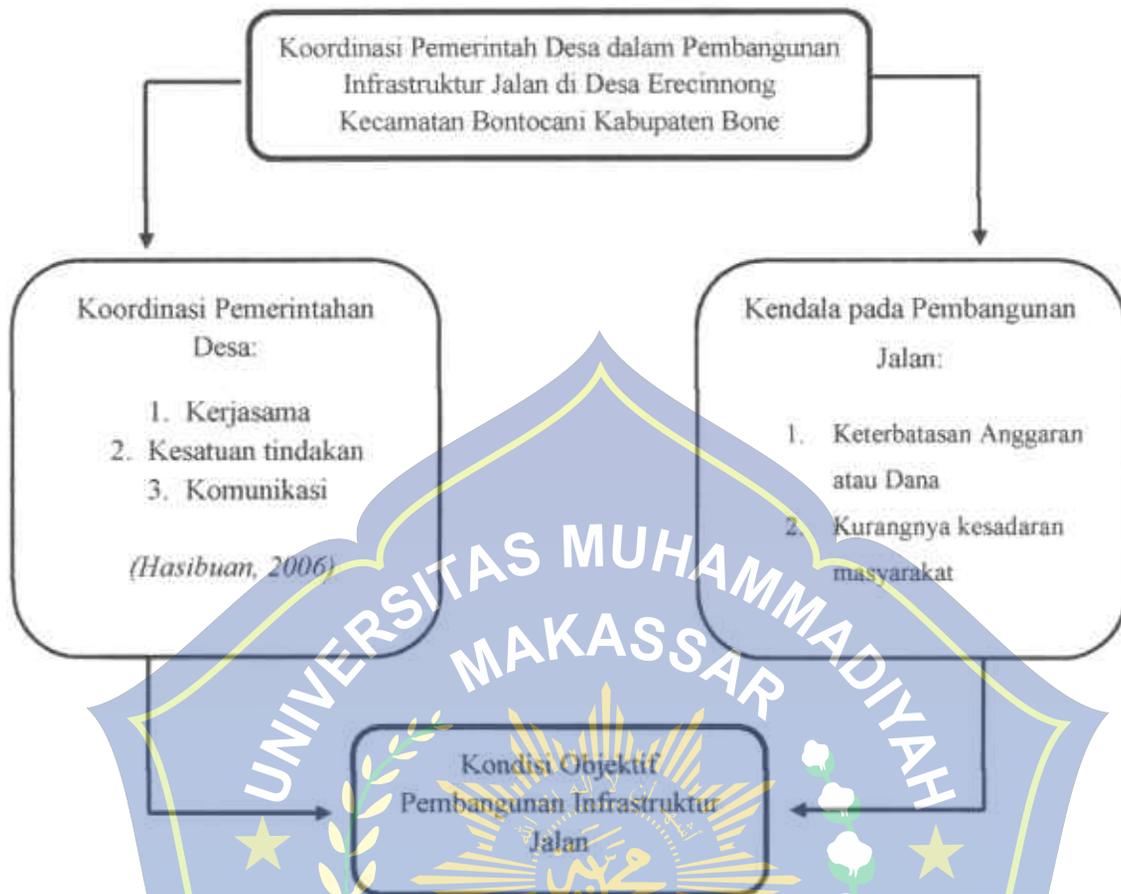
Jadi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur jalan, jaringan dan

tenaga listrik, hal ini disebabkan penyusunan pengelolaan anggaran Desa Erecinnong yang tidak terealisasi serta adanya pembagian alokasi yang tidak merata.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan di sebuah topik penelitian. Yang menjadi kriteria utama dalam membuat suatu kerangka berfikir agar dapat meyakinkan ilmuwan adalah alur-alur pemikiran yang logis, bisa dibilang bahwa kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun berdasarkan beragam teori yang telah dideskripsikan.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha meninjau bagaimana Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dengan cara menggambarkan menggunakan model dan tipe indikator koordinasi menurut Hasibuan dengan tahapan-tahapan yaitu Kerjasama, Kesatuan Tindakan, dan Komunikasi. Dan menggambarkan apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan. Berdasarkan penjelasan kerangka pikir, maka penulis akan menyederhanakan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai faktor untuk memperdalam penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan Koordinasi Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian ini, Maka dapat dikemukakan Deskripsi fokus penelitiannya yaitu:

1. Koordinasi adalah kerjasama pemerintah desa Erecinnong dengan instansi lainnya dan juga BPD, dalam mensukseskan terjadinya pembangunan infrastruktur jalan.
2. Kerjasama yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usaha kerjasama yang dilakukan pemerintah desa (kepala desa) dengan BPD dan pihak lembaga kemasyarakatan di desa dan juga masyarakat desa Erecinnong dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunannya.
3. Kesatuan tindakan yaitu bagaimana usaha/tindakan yang dilakukan pemerintah desa Erecinnong dalam setiap kegiatan supaya mendapat keserasian dengan masyarakat desa Erecinnong agar mencapai hasil bersama.
4. Komunikasi yang dimaksud penulis yaitu dengan adanya suatu informasi atau penyampaian dari kepala desa Erecinnong kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.
5. Anggaran atau dana yaitu apakah masalah biaya, sudah cukup atau tidak untuk melakukan pembangunan jalan di desa Erecinnong.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah sedikitnya antusias partisipasi masyarakat tentang apa yang akan dilakukan pemerintah desa Erecinnong.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, sejak tanggal tanggal 20 April 2021 sampai 20 Juni 2021. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Erecinnong kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dan Pemilihan lokasi tersebut karena di Desa Erecinnong adalah desa yang masih sangat jauh dengan ada pembangunan, sehingga masyarakat di desa erecinnong sangat mengeluhkan masalah pembangunan jalan yang belum terlaksana sepenuhnya. Maka dari itu penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa erecinnong dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, penelitian ini membahas tentang objek yang alamiah sesuai dengan apa yang telah terjadi maupun belum terjadi lapangan. Melalui jenis penelitian ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan bagaimana proses pencapaian tujuan dalam pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan

untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari lapangan baik itu melalui observasi atau melalui wawancara dengan pihak informan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong salah satunya adalah kepala desa ercinnong dan instansi yang terkait.

2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian yang sudah ada, yaitu berupa dokumen-dokumen, internet, artikel, jurnal, buku dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yaitu bersumber dari profil Desa Erecinnong dan dokumen yang terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong.

D. Informan Penelitian

Informan yaitu orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi mengenai koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penulis menentukan informan sebanyak 8 informan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1	A. Abd Rahman	AR	Kepala Desa Erecinnong
2	Saenaldi	SN	Sekretaris Desa Erecinnong
3	A. Arifin, S.Pd	AA	Kepala BPD Desa Erecinnong
4	Andi Dadan	AD	Bagian LPM Desa Erecinnong
5	Syamsul Rijal	SR	Kaur Umum dan Perencanaan Desa Erecinnong
6	Andi Irfan	AI	Kasi Pemerintahan
7	Ridwan	RW	Masyarakat Desa Erecinnong
8	Andi Kamaruddin	AK	Masyarakat Desa Erecinnong
9	Syahril	SR	Masyarakat Desa Erecinnong

E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara natural setting (kondisi yang alamiah), bahwa dalam metode ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi mengenai suatu masalah tertentu, atau bertukar

ide melalui tanya jawab, sehingga penulis bisa mendapatkan makna dalam suatu topic tersebut. Dengan wawancara penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan, yang dimana hal ini tidak bisa ditentukan melalui observasi.

Dalam melakukan wawancara penulis menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan dan mencatat apa yang dikemukakan informan. Penulis melakukan tanya jawab dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembanguana infrastruktur jalan di Desa Erecinnong.

2. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian. Yang dimana, penulis mengamati langsung lembaga pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, dengan mendatangi Desa Erecinnong, Kantor Desa Erecinnong dan rumah masyarakat desa Erecinnong untuk melakukan pengamatan langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berupa gambar, tulisan atau karya-karya seseorang. Dengan dokumentasi penulis dapat mendapatkan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat mendukung terhadap penelitian. Yang dimana, penulis mengumpulkan data seperti arsip-arsip mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong.

F. Teknik analisis data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong, maka mengenai hal tersebut akan di kemukakan disini mengenai analisis data yang bertujuan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pembangunan jalan pada Desa Erecinnong. Yang kemudian dijadikan perkiraan dasar untuk menjelaskan adanya keadaan terkini tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Setelah mengadakan observasi, penulis mengumpulkan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi atau sumber yang lain yang terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Pada pengumpulan data dan analisis data secara praktiknya tidak mudah dipisahkan, keduanya dikerjakan bersamaan. Penulis mengumpulkan data dengan cara mengedit data yaitu memeriksa data yang didapatkan mengenai kelengkapan data dan kebenaran data sehingga data bisa untuk diproses lebih lanjut.

Penulis memberikan tanda tertentu pada data yang di dapatkan di lapangan, dan dikelompokkan serta mengklarifikasikan data dengan cara mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai dengan sumber data masing-masing, kemudian penulis menyimpulkan data yang didapatkan sehingga hasil penelitian mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang diperoleh, data yang teruji dan data valid. Untuk membuktikan keabsahan data dari data tersebut dapat mencakup uji kredibilitas data terbagi sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Sejawat

Metode ini diselenggarakan dengan teknik mengungkapkan hasil sementara atau data yang didapatkan di akhir dalam bentuk diskusi atau bertukar pikiran dengan teman sejawat. Pemeriksaan sejawat mengandung pengertian atau penjelasan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan teman sebaya yang mempunyai pengalaman tentang objek atau masalah yang akan diteliti, sehingga bersama para rekan sejawat maka peneliti akan mereview pandangan dan hasil analisis yang dilakukan. Dalam mereview atau menganalisis sebuah informasi dalam pemeriksaan sejawat perlu dilakukan secara berulang kali agar masukan atau saran yang didapatkan dari hasil diskusi dan bertukar pikiran, data dan informasi yang diperoleh dapat disimpulkan dan digunakan sebagai media untuk mengevaluasi kembali hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dalam mengembangkan penelitian terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang mengenai pembangunan infrastruktur jalan, oleh karena itu penulis terus melakukan perbaikan pada data agar penulis mendapatkan data yang lebih baik.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah sebuah metode dalam memeriksa keabsahan data dengan menggunakan hal yang lain di luar data, dalam keperluan verifikasi atau sebagai perbandingan antara data yang satu dengan yang lainnya. Jadi triangulasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontraksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi pada penelitian adalah triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari data hasil wawancara dan data hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Kondisi Infrastruktur Jalan Desa Erecinnong

Sebagai fungsinya kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran antar kampung atau antar kecamatan. Pembangunan infrastruktur jalan yang berada antar desa dengan desa maupun desa dengan kota yang merupakan sarana mobilitas utama untuk melakukan berbagai proses transaksi, terutama jaringan jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat yang berada di Desa Erecinnong.

Kondisi jalanan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone hingga saat ini hampir keseluruhan jalanan dari perbatasan Desa Watangan hingga perbatasan Desa Samaenre itu masih belum tersentuh dengan yang namanya aspal, paving dan lain sebagainya, kondisinya masih belum ada yang berubah, masih jalanan bebatuan bercampur dengan tanah liat. Sehingga pada musim hujan alur transportasi dari Erecinnong itu sangat terhambat bahkan mobil angkutan umum (panter) dan mobil angkutan barang (trek) itu pada musim hujan tidak beroperasi presentasi kondisi jalan rusak mencapai 1.081,87 Km dan dari presentasi jalan rusak dan jalan baik yang berada di Kabupaten Bone, jalanan yang berada di Desa Erecinnong Masih berada dalam naungan presentasi jalan rusak.

2. Letak Geografis Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan wilayah terluas ketiga setelah Kabupaten Luwu dan Mamuju. Wilayahnya membujur dari utara ke selatan sepanjang 90 km yang meliputi daratan rendah di bagian timur khususnya yang menjadi tepian teluk Bone sehingga bagian barat terdiri atas perbukitan dengan ketinggian rata-rata 150 meter hingga 200 meter dari permukaan laut. luas wilayah kabupaten bone 4558 km² dengan kepadatan penduduk 141 jiwa/km². Dari luas wilayah tersebut pada tahun 2014 Kabupaten Bone secara administrasi terbagi kedalam 27 kecamatan, 329 desa dan 43 kelurahan.

Tabel 4.1

Kabupaten Bone berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kabupaten Wajo
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kabupaten Soppeng, Maros, Pangkep, dan Barru
Sebelah Timur	Adalah teluk Bone yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Kabupaten Bone merupakan daerah yang beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar sekitar 95% - 99% dengan tempratur berkisar 26°C-43°C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Secara administrasi, Kabupaten Bone terbagi menjadi 27 kecamatan dengan luas wilayah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.2

Pembagian Luas Wilayah Kecamatan (Km²) Kabupaten Bone Sulawesi

Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas area (km ²)	presentasi luas wilayah kabupaten
1	Bontocani	463,35	10,16
2	Kahu	189,50	4,16
3	Kajuara	124,13	2,72
4	Salamekko	84,91	1,86
5	Tonra	200,32	4,39
6	Patimpeng	130,47	2,86
7	Libureng	344,25	7,55
8	Mare	263,50	5,78
9	Sibulue	155,80	3,42
10	Cina	147,50	3,24
11	Barebbo	114,20	2,50
12	Ponre	293,00	6,43
13	Lappariaja	138,00	3,03
14	Lamuru	208,00	4,56
15	Tellu Limpoe	318,10	6,98
16	Bengo	164,00	3,60
17	Ulaweng	161,67	3,55
18	Palakka	115,32	2,56
19	Awangpone	110,70	2,43
20	Tellu Siattingge	159,30	3,49
21	Amali	119,13	2,61
22	Ajangale	139,00	3,05
23	Dua Boccoe	144,90	3,18
24	Cenrana	143,60	3,15
25	Tanete Riattang Barat	53,68	1,18
26	Tanete Riattang	23,79	0,52
27	Tanete Riattang Timur	48,88	1,07
	Bone	4.559,00	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Bone 2020

Dari 27 wilayah Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bone, Kecamatan Bontocani merupakan wilayah pemerintah daerah dimana lokasi

penelitian berada. Wilayah ini terletak di bagian selatan Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai.

Topografi Kalau kita amati Kabupaten Bone termasuk daerah tiga dimensi yaitu ; Pantai, Daratan dan Pegunungan, luas sawah sebagai lahan pertanian adalah 455.600 Ha, sehingga Kabupaten Bone ditetapkan sebagai daerah penyangga beras untuk Propinsi Sulawesi Selatan yang biasa dikenal dengan istilah BOSOWA SIPILU singkatan dari Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu, begitu pula daerah pantainya sangat panjang membujur dari Utara ke Selatan yang menyusuri Teluk Bone dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, 9 diantaranya adalah masuk daerah pantai seperti Kecamatan Cenrana, Tellu Sianting e, Awangpone, Tanette Riattang Timur, Sibulu e, Mare, Tonra, Salomekko dan Kajuara, dengan demikian sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Bone sebagian besar adalah Petani dan Nelayan.

Jumlah Penduduk Di Kabupaten Bone Penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2016 berjumlah 746.973 orang dari 27 kecamatan. Secara keseluruhan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bone 2016. Berikut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Jenis Kelamin Di Kabupaten Bone

2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bontocani	7.804	7.865	15.669
2	Kahu	18.522	20.052	38.574
3	Kajuara	17.632	18.549	36.181
4	Salamekko	7.581	7.879	15.460
5	Tonra	6.544	6.992	15.536
6	Patimpeng	7.964	8.487	16.451
7	Libureng	14.462	14.843	29.805
8	Mare	12.877	13.633	26.510
9	Sibulue	15.994	17.999	33.993
10	Cina	12.594	13.716	26.310
11	Barebbo	12.788	14.627	27.415
12	Ponre	6.726	7.054	13.780
13	Lappariaja	11.334	12.403	23.737
14	Lamuru	11.593	13.258	24.878
15	Tellu Limpoe	7.020	7.032	14.052
16	Bengo	12.623	13.187	25.450
17	Ulaweng	11.533	13.166	24.699
18	Palakka	10.473	12.091	22.564
19	Awangpone	13.569	15.707	29.276
20	Tellu Siattingge	18.628	21.411	40.039
21	Anrali	9.431	11.275	20.706
22	Ajangale	12.724	14.685	27.409
23	Dua Boccoe	13.925	16.249	30.172
24	Cenrana	11.424	12.623	24.047
25	Tanete Riattang Barat	22.928	24.810	47.738
26	Tanete Riattang	24.285	27.379	51.664
27	Tanete Riattang Timur	21.386	21.411	42.797
Bone		354.502	388.410	746.973

Sumber : BPS, Bone dalam angka 2020

3. Gambaran Umum Kecamatan Bontocani

Kecamatan Bontocani merupakan salah satu dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Dengan luas wilayah 463,35. Dalam Kecamatan Bontocani terdapat 11 desa bukan merupakan daerah pantai. Berikut luas wilayah menurut desa di Kecamatan Bontocani dalam bentuk tabel.

Tabel 4.4

Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bontocani 2020

No	Desa/Kelurahan	Status	Luas Wilayah
1	Watang Cani	Desa	50,53
2	Pattukku	Desa	30,24
3	Bontolai	Desa	51,25
4	Bulu Siru	Desa	42,19
5	Bana	Desa	69,16
6	Pammusueng	Desa	32,30
7	Kahu	Kelurahan	34,26
8	Langi	Desa	59,20
9	Erecinnong	Desa	35,04
10	Lamoneong	Desa	29,42
11	Mattirowalie	Desa	29,76

Sumber : BPS, Kabupaten bone dalam angka 2020

4. Gambaran Umum Desa Erecinnong

Kelurahan/Desa Erecinnong merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Kelurahan/Desa Erecinnong mempunyai luas wilayah yaitu 35,5 km bujur sangkar. Erecinnong terdiri dari dua suku kata yaitu ere dan cinnong, ere (berasal dari bahasa konjo/makassar) artinya air, dan cinnong (berasal dari bahasa bugis) yang artinya jernih, jika di gabungkan maka memiliki arti air yang tidak pernah keruh yang timbul ditengah-tegah batu cadas. Jarak ke ibu kota kecamatan 40-45 km dan jarak

ke Kota Kabupaten 112 km. Kelurahan/Desa Erecinnong memiliki 3 dusun yaitu Dusun Allekkang, Kampung Baru, dan Desa Kalubimpi dengan jumlah penduduk 1.346. Dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lamoncong
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pattuku
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Langi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Watangcani

Desa Erecinnong terdiri dari dua suku kata yaitu Ere dan Cinnong. Ere (berasal dari bahasa konjo/makassar) artinya air, dan Cinnong (berasal dari bahasa bugis) yang artinya jernih, jika digabungkan maka Erecinnong memiliki arti air yang jernih atau tidak pernah keruh yang timbul ditengah-tengah cadas. Jarak antara Desa ke Ibu Kota Kecamatan 40-45 km dan jarak Desa ke Kota Kabupaten 112 km. Desa Erecinnong terbagi atas 3 Dusun, yaitu Dusun Allekkang, Kampung Baru, dan Kalubimpi. Ketinggian tanah wilayah Desa Erecinnong 727 Mdpl. Dengan suhu rata-rata antara 200C sampai dengan 290C dengan curah hujan rata-rata 1,00 mm/tahun.

A. Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa Erecinnong Berikut ini tabel jumlah penduduk Desa Erecinnong berdasarkan dusun:

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Desa Erecinnong Berdasarkan Dusun tahun 2020

No	Dusun	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Allekkang	251	243	494
2	Kampung Baru	243	286	529
3	Kalubimpi	130	193	323
	Jumlah	624	722	1.346

Sumber : Data Desa Erecinnong

- B. Sumber mata pencaharian dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa penduduk bekerja, hampir keseluruhan dari warga Desa Erecinnong adalah petani padi, kacang tanah, cabe dan peternak sapi. Dan tidak sedikit warga Desa Erecinnong yang merantau, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- C. Agama ditinjau dari segi agama yang dianut masyarakat Kelurahan/Desa Erecinnong, maka keseluruhan penduduk Kelurahan/Desa Erecinnong adalah beragama islam. Terdapat dua buah mesjid yang menjadi tempat ibadah warga setempat dan belum terdapat sebuah mushollah.
- D. Pendidikan Ditinjau dari pendidikan keseluruhan penduduk Kelurahan/Desa Erecinnong adalah rata-rata berpendidikan SD/SEDERAJAT.

Tabel 4.6

Sarana Pendidikan Yang Ada Di Desa Erecinnong

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD/SEDERAJAT	1
3	SMP	1
4	SMA	-

Sumber: Data Desa Erecinnong

E. Jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Erecinnong masih sangat memprihatinkan karena sampai saat ini sarana pendidikan di tingkat SMA masih belum ada.

F. Jumlah kartu keluarga Jumlah keseluruhan masyarakat Desa Erecinnong yaitu 1.345 jiwa dengan jumlah kartu keluarga yang tercatat dalam laporan data kependudukan Erecinnong yaitu sebanyak 346 kartu keluarga. Fasilitas yang ada Ditinjau dari segi ketersediaan fasilitas yang terdapat di Erecinnong maka:

Tabel 4.7

Fasiilitas yang Ada di Desa Erecinnong

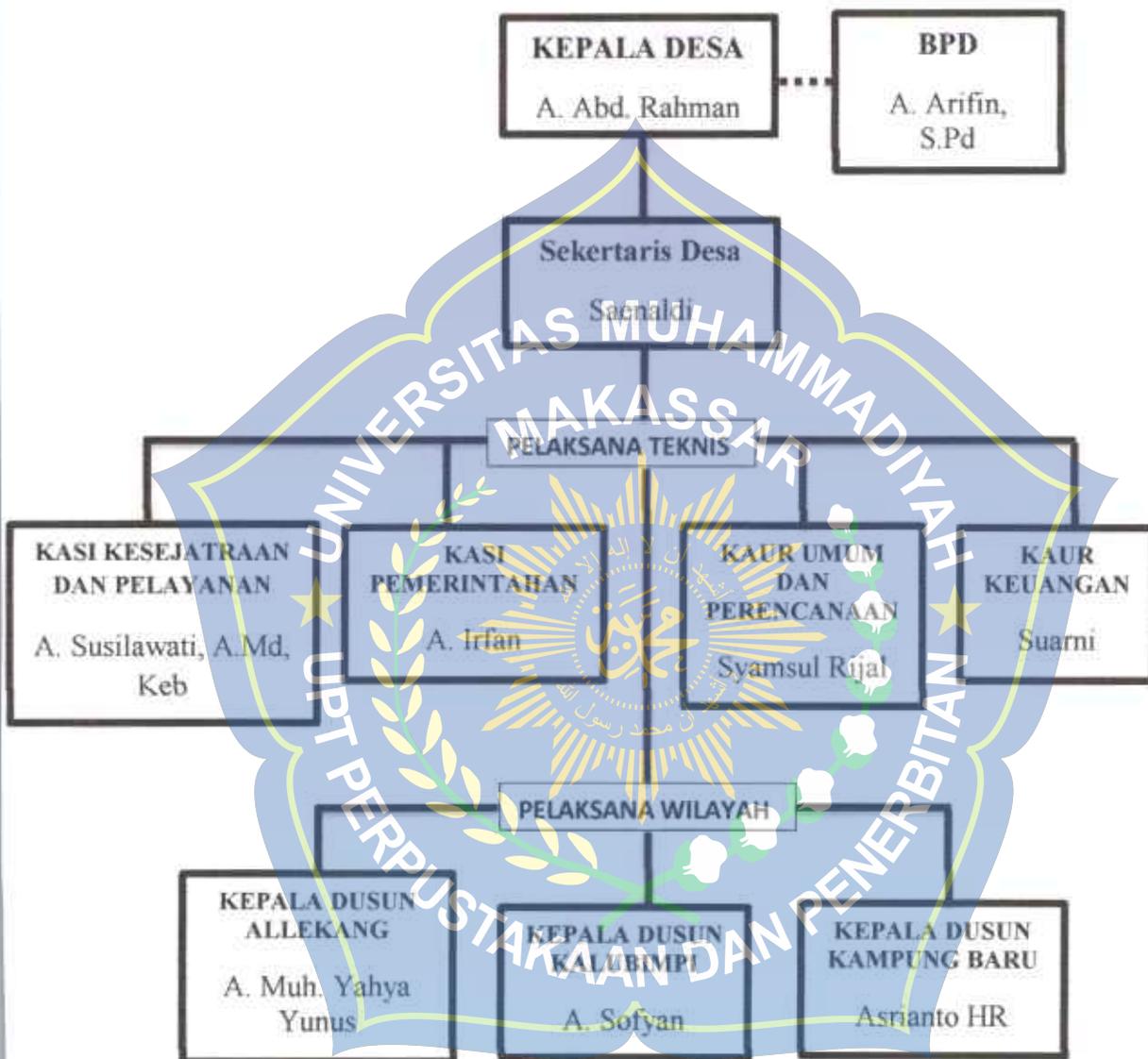
No	Fasilitas Yang Ada
1	Kantor Desa
2	Pasar
3	Irigasi
4	Poskedes
5	Pos Kamling

Sumber : Data Desa Erecinnong

Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Erecinnong Kecamatan

Bontocani Kabupaten Bone



B. Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Menurut dari beberapa pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulan gabungan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

Maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat maka perlu didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana jalan, listrik dan jaringan karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka tugas-tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Dan disisi lain dapat memudahkan aksesibilitas penduduk dalam segala bentuk yang menyangkut kegiatan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jalan adalah unsur yang sangat penting karena salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya. Maka dari itu penulis melihat bahwa Desa Erecinnong masih tertinggal jauh dalam hal pembangunan infrastruktur hal ini diperkuat dengan melihat kondisi infrastruktur Desa Erecinnong dalam hal jalan yang hingga kini masih belum ada perubahan hingga saat ini.

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran perkembangan dan pengembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terhambat bahkan hasilnya pun kurang optimal. Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum. Pentingnya infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari nilai yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya.

Ada 3 alasan pokok tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu:

- a. Pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu hal penting dan langkah menuju kearah rakyat dan negara adil dan makmur.
- b. Infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan

integrasi sosial-ekonomi rakyat suatu daerah dengan daerah lainnya.

- c. Pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik sejumlah wilayah.

Berdasarkan uraian diatas maka pemerintah sangat diharapkan untuk mencoba terobosan baru dalam politik infrastruktur diantaranya yaitu pemerintah daerah perlu mengkaji ulang kebijakan infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong yang dinilai masih tidak optimal karena hingga kini 3 infrastruktur yang terbilang sangat penting belum terealisasi hingga saat ini diantaranya jalan, jaringan dan listrik. Berikut penulis akan menguraikan tentang kondisi dan pentingnya infrastruktur jalan di Desa Erecinnong.

Dalam pembahasan pada indikator Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur jalan Desa Erecinnong melakukan bentuk koordinasi menggunakan indikator kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi. Data berikut diperkuat dengan oleh hasil wawancara dengan beberapa pihak dari Pemerintah Desa Erecinnong dan masyarakat. Berikut hasil wawancara yang dihimpun dari beberapa informan terkait dengan bentuk koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa Erecinnong sebagai berikut:

1. Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan.

Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

Koordinasi dan hubungan kerjasama adalah dua pengertian yang saling terkait, koordinasi dapat tercapai atau terjalin jika terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerjasama adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi, karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi ialah tercapainya koordinasi yang berdaya guna (efektif dan efisien). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan bapak A. Abd. Rahman selaku kepala Desa Erecinnong mengatakan:

“Sebelumnya kita disini sebagai pemerintah desa Erecinnong sudah mengatur akan melakukan pembangunan jalan karena masyarakat disini sangat mengeluhkan tentang jalanan yang rusak sehingga membuat mereka kesulitan menjangkau suatu tempat ketika mau

berpergian, kami juga sudah membicarakan dengan BPD agar anggaran yang diberikan bisa menyelesaikan pembangunan jalan yang sudah direncanakan, karena pada umumnya BPD sebagai mitra kerja dengan pemerintahan. Selain itu kita juga kerjasama dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang dimana LPM juga ikut dalam lingkup kerja pemerintah disini” (Hasil wawancara dengan bapak AR, 17/05/2021).

Dari wawancara bahwa pemerintah Desa Erecinnong sudah mempersiapkan hal mengenai pembangunan jalan, dan juga Desa Erecinnong sudah menerima anggaran dana untuk membangun jalan yang sudah rusak.

Koordinasi antara Kepala Desa Erecinnong dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh bapak Andi Dadan selaku LPM Desa Erecinnong, sebagai berikut:

“sebelum melakukan kegiatan pembangunan, saya disini tergolong dalam LPM Desa Erecinnong ikut melakukan membantu kepala desa dek melakukan rapat memberikan usulan atau ide-ide, kepala desa juga konsultasi bagaimana rencana pembangunan jalan, kami adakan juga sosialisasi sama masyarakat, supaya koordinasi kerjasama disini terjalin. Kami juga mengontol kerjasama pembangunan jalan ini dengan pemerintah, supaya ini jalan yang mau dibangun sesuai yang direncanakan” (Hasil wawancara dengan bapak AD, 17/05/2021).

Dari hasil wawancara Koordinasi diagonal yang dilakukan kepala desa dengan LPM. Hubungan kerja kepala desa dengan LPM melalui rapat

musrenbangdes yang dilakukan setiap tahun. LPM berperan aktif dan ikut serta dalam penyampaian usulan prioritas pembangunan desa berdasarkan aspirasi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang diperlukan desa dan masyarakat desa. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan pengendalian pembangunan.

LPM sebagai mitra kerja Pemerintahan, berfungsi:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa /kelurahan.
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
- c. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
- d. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
- e. Sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antara masyarakat itu sendiri.
- f. Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan.
- g. Mendorong mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

h. Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup.

Adapun bentuk hubungan antara pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menurut Himawan Pembudi dalam Hadinus, Eka (2011) adalah:

- a. Hubungan pertanggung jawaban, dimana LPM memberikan pertanggung jawaban atas kerja-kerja yang dilakukan.
- b. Hubungan konsultasi dan kerjasama, dimana pemerintah desa bisa melakukan konsultasi dan kerjasama dengan LPM.
- c. Hubungan kerja, dalam hal ini membuat perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- d. Hubungan Koordinasi dimana kedua lembaga saling koordinasi untuk mendapat hasil yang diinginkan dalam hal ini penyusunan rencana pembangunan desa.

Adapun mengenai kerjasama dengan masyarakat, bapak Saenaldi selaku sekretaris desa Erechinong mengatakan:

“Yah kami sudah memberitahukan juga kepada masyarakat untuk supaya bisa hadir memberikan bantuan bekerjasama melakukan pembangunan jalan agar dapat terselesaikan dengan mudah” (Hasil wawancara dengan bapak SN, 17/05/2021).

Dari hasil wawancara bahwa pemerintah Desa sudah mengupayakan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar turut hadir memberikan bantuan agar pembangunan jalan yang dilakukan dapat berjalan dengan

mudah. Bapak A.Arifin, S.Pd sebagai kepala BPD Desa Erecinnong pun mengatakan:

“Kami kemarin rapatkan dengan kepala desa untuk merumuskan pendapat mengenai tentang penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk melakukan pembangunan yang merupakan usulan dari musyawarah desa (musrenbangdes) yang kemudian disahkan. Dan penyelenggaraan pembangunan ini kita lakukan secara transparan dan terinci secara jelas” (*Hasil Wawancara dengan bapak AA,17/05/2021*).

Kepala Desa Erecinnong dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Erecinnong semua aparatur pemerintah Desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Erecinnong yang profesional dan akuntabel.

Adapun dari bapak Syamsul Rijal selaku pelaksana teknis Desa Erecinnong mengatakan:

“kepala desa juga keluar meminta bantuan untuk melakukan kerjasama dengan dengan pihak kabupaten dan swasta. Yang mana pihak kabupaten yaitu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ditunjukkan kepada dinas-dinas terkait dan swasta yang ditujukan

kepada Perseroan terbatas (PT) suatu bentuk perusahaan” (*Hasil wawancara dengan bapak SR, 17/05/2021*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pembangunan kepala desa dengan perusahaan swasta melalui bentuk pemeliharaan hubungan untuk meningkatkan keserasian kerja. Bentuk koordinasi yang dilakukan dengan perusahaan swasta, menggunakan surat permohonan pengajuan bantuan pembangunan (proposal) sebagai bentuk usulan pembangunan prioritas dari desa yang berasal dari musyawarah bersama masyarakat desa. Namun, hubungan kerja dengan pihak ketiga belum dilakukan sepenuhnya karena masih belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat di Desa Erecinnong.

Menurut teori Weichhart dalam Warsono (2009:81) mengatakan kerjasama pada lingkup koordinasi dalam pembangunan adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Kerjasama merupakan suatu mekanisme lanjutan yang dapat terjalin apabila sudah terjalin hubungan kerja dan koordinasi baik antar bagian atau organisasi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada indikator kerjasama, yang mana dalam hal kerjasama pemerintah desa telah melakukan suatu interaksi atau kerjasama dengan pihak BPD, LPM, dan juga mengusahakan terjalinnya kerjasama dengan LKPD maupun Perseroan terbatas (PT). Adapun interaksi yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong.

2. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Kesatuan tindakan merupakan kesatuan dari pada usaha bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan juga merupakan kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Di dalam pelaksanaannya pemimpin harus memiliki usaha-usaha kreatif dan memiliki inisiatif dalam menyadarkan anggotanya dalam melaksanakan koordinasi dilapangan.

Kreatifitas yang dimaksudkan bahwa seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru, sebagai kemampuan untuk

menciptakan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Kemudian berinisiatif bahwa seorang pemimpin dapat mengembangkan dan memberdayakan sektor kreatifitas daya pikir manusia untuk merencanakan idea atau buah pikiran menjadi konsep yang baru yang dapat bermanfaat. Oleh karena itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi, penguatan kelembagaan organisasi dapat memberikan kesatuan tindakan dalam menjalankan tujuan dari organisasi tersebut karena memiliki acuan dasar yang kuat dalam menjalankannya. Dari hasil wawancara terkait kesatuan tindakan peneliti mewawancarai bapak Syamsul Rijal sebagai pelaksana teknis di Desa Erecinnong:

“iya, kesadaran masyarakat disini juga dibutuhkan karena demi menjalankan pembangunan alangkah baiknya kalau pemerintah dan masyarakat bersama-sama melakukan atau bergotong royong supaya terjalannya suatu tindakan yang membuahkan hasil yang baik” (*Hasil wawancara dengan bapak SR, 17/05/2021*).

Jadi dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa pentingnya kesadaran terkhusus pada masyarakat desa Erecinnong, agar demi membangun desa apalagi pada pembangunan infrastruktur jalan alangkah baik jika masyarakat turut membantu melakukan tindakan agar bisa tercapainya apa yang diinginkan. Selanjutnya wawancara dilakukan oleh bapak Saenaldi selaku sekretaris desa Erecinnong:

“kalau urusan persiapan kami sudah siapkan semua sudah diatur bagaimana nanti alurnya kegiatan pembangunan ini jalan, sudah direncanakan semua agar bisa berjalan lancar, dan kalau untuk masalah tindakan yang diberikan warga, saya waktu itu turut

membantu tapi cuma sebagian saja masyarakat yang ikut dek yah karena mungkin ada juga kesibukannya masing-masing toh”(*Hasil wawancara dengan bapak SN, 17/05/2021*).

Dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa pemerintah Desa Erecinnong dalam upaya melakukan kesatuan sudah mempersiapkan segala hal dengan matang agar pembangunan infrastruktur jalan bisa berjalan dengan lancar tapi pada umumnya di masyarakat masih ada sebagian masyarakat yang ikut dan juga tidak ikut turut hadir dalam melakukan perbaikan jalan sehingga dalam proses ini kesatuan tindakan tidak berjalan baik karena cuma sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terwujudnya hasil yang maksimal.

Menurut teori Hasibuan (2011:88) mengatakan kesatuan tindakan pada lingkup koordinasi dalam pembangunan adalah pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Hal itu sejalan dengan hasil penelitian, yang mana pemerintah Desa Erecinnong dalam upaya melakukan kesatuan sudah mempersiapkan segala hal dengan matang agar pembangunan infrastruktur jalan bisa berjalan dengan lancar tapi masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori Hasibuan karena masih ada sebagian masyarakat yang ikut dan juga tidak ikut turut hadir dalam melakukan perbaikan jalan sehingga dalam proses ini kesatuan tindakan tidak berjalan baik karena cuma sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terwujudnya hasil yang maksimal.

3. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. "Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan". Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran tugas pemerintahan termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa

terjalannya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah maka akan sangat sulit untuk diketahui apa yang telah dicapai, apa yang akan diraih serta kendala-kendala apa yang di hadapai dalam suatu pekerjaan. Dan komunikasi adalah sumber informasi dari pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan yang dibuat atau pun mengenai pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut di perjelas oleh wawancara penulis dengan salah satu informan penulis yaitu :

“Yah, kami sudah menyampaikan kepada masyarakat. Kami kumpulkan beberapa masyarakat disini di balai desa untuk menyampaikan tentang masalah pembangunan ini. Lalu kami memusyawarakan bagaimana baiknya pelaksanaan pembangunan jalan ini” (*wawancara dengan bapak AI, 17/05/2021*).

Adapun tanggapan dari bapak Ridwan sebagai masyarakat desa Erecinnong mengatakan:

“Iye, saya ikut waktu kepala desa suruh berkumpul di balai desa untuk memusyawarakan itu tentang pembangunan jalan, karena kita dipanggil, ada juga sebagian tidak hadir” (*Hasil wawancara dengan bapak RW, 17/05/2021*).

Komunikasi pemerintah dalam hal ini kepala desa untuk dapat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan desa yang akan di laksanakan di desa Erecinnong dan juga kepada masyarakat setempat agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan. Peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah desa Erecinnong sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Pernyataan kepala desa Erecinnong:

“Waktu itu pas penyampaian sebagian saja masyarakat yang ikut. Jadi makanya mungkin pas pembangunan ini jalan hanya sebagian masyarakat yang ikut serta membantu”(*Hasil wawancara dengan bapak AR, 17/05/2021*).

Adapun pernyataan dari bapak Andi Kamaruddin sebagai masyarakat desa Erecinnong:

“Waktu itu saya tidak ikut, karena tidak tau adanya pertemuan. Karena informasinya tidak ada saya dengar dek”(*Hasil wawancara dengan bapak AK, 17/05/2021*).

Kesimpulan dari wawancara diatas ialah penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah desa belum tersampaikan dengan merata. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut memberikan bantuan karena tidak mengetahui tindakan yang dibuat pemerintah desa dengan pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Erecinnong.

Komunikasi Pemerintah adalah penyampaian, ide program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara dalam hal ini pemerintah dapat di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang di inginkan masyarakat. Komunikasi yang dibangun oleh aparat pemerintah desa adalah komunikasi yang melahirkan konsep atau gagasan dalam pembangunan desa. Dengan adanya komunikasi antara aparat/pemerintah desa dan masyarakat maka akan menunjang proses koordinasi dari pembangunan desa khususnya di Desa Erecinnong.

Menurut teori Hasibuan (2011:88) mengatakan komunikasi pada lingkup koordinasi dalam pembangunan adalah Komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Pada hasil penelitian tidak sejalan dengan teori Hasibuan, komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Erecinnong belum maksimal dikarenakan masih ada masyarakat belum mengetahui apa yang akan dilakukan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong. Padahal pemerintah di Desa Erecinnong sudah menyampaikan kepada sebagian masyarakat saja. Komunikasi yang dibangun oleh aparat/pemerintah desa adalah komunikasi yang melahirkan konsep atau gagasan dalam pembangunan desa.

C. Kendala Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dengan tanda-tanda dari suatu keadaan tertentu yang di anggap kurang dikehendaki menuju ke suatu keadaan teretentu yang di kehendaki. Bila pemahaman tersebut diaplikasikan di desa maka pembangunan desa merupakan perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi tertentu yang dinilai kurang baik, kearah yang lebih baik atau lebih diinginkan. Namun dalam pembangunan sering terhambat dalam proses pelaksanaannya, sering kita jumpai adanya hambatan-hambatan, terlepas dari itu sama halnya dengan koordinasi pemerintah desa pada pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong dalam pengkoordinasian juga menjumpai beberapa hambatan.

Dalam koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong terdapat beberapa faktor penghambat berjalannya pelaksanaan koordinasi tersebut yaitu diantaranya:

1. Keterbatasan Anggaran atau Dana

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan Anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penghambat ketidak optimalan koordinasi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong. Seperti yang dituturkan oleh kepala Desa Erecinnong dalam wawancara peneliti dengan beliau bahwa:

“Memang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong ini terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, namun faktor yang paling berpengaruh yaitu masalah anggaran, yang mana kita ketahui bahwasanya kabupaten bone adalah merupakan kabupaten

yang terluas di Sulawesi Selatan namun anggaran yang keluar setiap tahun itu sama dengan kabupaten lain, nah anggaran itulah yang di alokasikan ke 27 kecamatan di kabupaten bone saya pikir itu faktor penghambat yang paling menonjol, dan ada beberapa diantaranya seperti misalnya masyarakat yang tidak mau bersatu, itu dilihat ketika diadakan gotong royong setiap minggu hanya beberapa masyarakat yang ikut serta yang lainnya sibuk dengan urusan pribadinya padahal gotong royong itu untuk kenyamanan kita bersama”

Dari hasil wawancara diatas kita ketahui bahwa yang menjadi kendala utama dalam program pemerintah adalah keterbatasan anggaran, namun hal diatas dapat terbantahkan jika kita melihat ADD yang mana ADD ini di alokasikan dengan melihat luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kemiskinan suatu daerah jika suatu wilayah luas maka ADD nya juga akan tinggi karena sekarang ini kita mengenal istilah membangun Indonesia dari desa kalau desa maju maka Indonesia akan maju dan kenapa Indonesia harus maju? Indonesia harus maju karena sekarang ini ADD sudah tinggi.

Pada masalah pembangunan jalan, masih ada masyarakat yang mengeluh. Seperti bapak syahril sebagai masyarakat Desa Erecimong memberikan pendapatnya:

“Yang saya lihat memang jalan sudah diperbaiki sudah juga di beton tapi cuma sebagian masih ada daerah yang belum juga di beton masih tidak bagus jalannya, ada juga yang di beton tapi kebanyakan pasir saja” (Wawancara dengan bapak SH, 17/05/2021).

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang mengeluh karena pada pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah masih ada daerah yang belum diperbaiki jalannya, terlebih dari pembangunan jalan yang dilakukan masih memiliki kekurangan sebab jalanan yang diperbaiki kebanyakan pasir daripada beton. Karena dalam hal ini adalah wajar karena

mengingat total anggaran APBDES RP. 690. 444. 7000, seperti yang terlihat pada uraian APBD Desa Erecinnong tahun 2019:

No	Program	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.487.821.000
2	Peningkatan Sarana & Prasarana aparatur	Rp. 370.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 218.511.000
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja & keuangan	Rp. 24.440.000
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja & keuangan	Rp. 24.440.000
6	Pengembangan Data/informasi	Rp. 187.477.000
7	Peningkatan promosi & Kerjasama Investasi	Rp. 166.000.000
8	Perlindungan & Konservasi dan sumber daya alam	Rp. 624.135.000
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan	Rp134.588.813.400
10	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rp. 150.000.000
11	Pembangunan sistem Informasi/Data Base Jalan & Jembatan	Rp. 177.790.000
12	Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan	Rp. 1.660.058.000
13	Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Rp. 47.246.451.500
14	penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp. 214.145.000
15	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp. 14.022.340.000
16	Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp. 212.790.000
	Jumlah	Rp. 223.934.682.902

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Tahun Anggaran 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat mengenai APBD Desa Erecinnong tahun 2019, untuk pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur dan lingkungan hidup memiliki jumlah anggaran sebanyak Rp. 367.745.500 pertahunnya namun kondisi objektif infrastruktur desa itu tidak ada perubahan yang signifikan. Maka pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih jeli dalam mengelola anggaran dan harus melakukan transparansi kepada masyarakat.



Adapun terkait proses pengelolaan anggaran desa harus berdasar pada pasal 3 permendagri No. 37 tahun 2007, di sebutkan bahwa kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang di pisahkan dengan kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- e. Menciptakan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yang terdiri dari: sekretaris desa dan perangkat desa. Dari proses tata kelola anggaran dana desa diatas maka penulis melihat tentang tata kelola anggaran dana desa di Desa Erecimong yaitu anggaran itu di transfer langsung dari pemerintah kabupaten kemudian anggaran tersebut di kelola dengan diawasi oleh pendamping desa yang telah ditunjuk 2 orang untuk mengawasi berjalannya program-program pemerintah. Misalnya dari dana tersebut yang di anggarkan untuk RAB (rencana anggaran pembangunan) dan RAB tersebut harus sesuai dengan apa yang di implemmentasikan, karena jika tidak itu akan menjadi salah satu faktor yang akan menghambat berjalannya pembangunan. Dan disini sebenarnya adalah peranan penting aparat desa dalam mengelola ADD

agar bagaimana mereka harus jeli mengelola anggaran tersebut agar program-program desa itu terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat

Masyarakat memiliki peranan penting dalam pembangunan program pemerintah, termasuk dalam bidang pembangunan infrastruktur, salah satu peran masyarakat dalam pembangunan yaitu dengan memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga infrastruktur tersebut tidak cepat rusak yang nantinya akan direnovasi ulang dan memakan biaya. Hal tersebut dapat dilihat hasil wawancara dengan bapak Saenaldi yaitu:

“sejauh yang saya tahu dan saya lihat beberapa tahun ini bahwa memang yang menjadi faktor terhambatnya pembangunan jalan di Desa Erecinnong adalah mengenai anggaran, dan ada beberapa juga yang lainnya seperti masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan bergotong royong untuk membangun desa, masyarakat Cuma mengandalkan pihak pemerintah saja. Padahal jika masyarakat juga turut membantu pembangunan akan dengan mudah berlangsung” (wawancara dengan bapak SE, 17/05/2021).

Terlepas dari tiga faktor diatas maka ada beberapa faktor lain yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur jalan desa Erecinnong yaitu:

- a. Ketidak bersatuan masyarakat Desa Erecinnong, hal ini dapat dilihat dengan wawancara peneliti dengan kepala Desa Erecinnong yang menegaskan bahwa masyarakat Desa Erecinnong itu tidak bersatu salah contohnya itu jika diadakan gotong royong hanya beberapa yang turut andil dalam kegiatan itu dan pada dasarnya kegiatan tersebut juga merupakan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.



- b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah, dan Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan di daerahnya. Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi, dan keinginan kelompok masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diawali oleh adanya sosialisasi yang optimal dari pihak-pihak yang bertanggung jawab (pemerintah desa) tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan atau perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor dalam pengkoordinasian pembangunan karena sangat mempengaruhi kelancaran suatu program serta kepedulian masyarakat terhadap infrastruktur yang telah disediakan pemerintah juga menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya pembangunan di Desa Erecinnong.

Pembahasan:

1. Kerjasama

Pada hasil penelitian di indikator kerjasama, yang mana dalam hal kerjasama pemerintah desa telah melakukan suatu interaksi atau kerjasama dengan pihak BPD, LPM, dan juga mengusahakan terjalinya kerjasama dengan LKPD maupun Perseroan terbatas (PT). Adapun interaksi yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong.

Hal ini sejalan dengan teori Weichhart dalam Warsono (2009:81) mengatakan kerjasama pada lingkup koordinasi dalam pembangunan adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Kerjasama merupakan suatu mekanisme lanjutan yang dapat terjalin apabila sudah terjalin hubungan kerja dan koordinasi baik antar bagian atau organisasi.

Pada indikator kerjasama Kepala Desa Precinnong dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar

memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing.

2. Kesatuan Tindakan

Pada hasil penelitian, yang mana pemerintah Desa Erecinnong dalam upaya melakukan kesatuan sudah mempersiapkan segala hal dengan matang agar pembangunan infrastruktur jalan bisa berjalan dengan lancar tapi masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori Hasibuan karena masih ada sebagian masyarakat yang ikut dan juga tidak ikut turut hadir dalam melakukan perbaikan jalan sehingga dalam proses ini kesatuan tindakan tidak berjalan baik karena cuma sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terwujudnya hasil yang maksimal.

Hal ini sejalan dengan teori Hasibuan (2011:88) mengatakan kesatuan tindakan pada lingkup koordinasi dalam pembangunan adalah pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu

dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Dan seharusnya masyarakat dalam hal menyatukan tindakan harus turut berperan serta membantu pemerintah desa dalam pelaksanaannya. Sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong dapat terselesaikan dengan baik.

3. Komunikasi

Pada hasil penelitian tidak sejalan dengan teori Hasibuan, komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Erecinnong belum maksimal dikarenakan masih ada masyarakat belum mengetahui apa yang akan dilakukan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong. Padahal pemerintah di Desa Erecinnong sudah menyampaikan kepada sebagian masyarakat saja. Komunikasi yang dibangun oleh aparat pemerintah desa adalah komunikasi yang melupakan konsep atau gagasan dalam pembangunan desa.

Menurut teori Hasibuan (2011:88) mengatakan komunikasi pada lingkup koordinasi dalam pembangunan adalah Komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat

bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Di indikator komunikasi seharusnya Pemerintah Desa Erecinnong dalam penyampaian kepada masyarakat lebih teliti agar informasi yang di tujukan kepada masyarakat tersalurkan secara menyeluruh bukan cuma sebagian masyarakat saja yang mengetahui penyampaiannya. Karena pada lingkup komunikasi Pemerintah Desa Erecinnong tidak semua masyarakat yang mengetahui akan pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah Desa Erecinnong.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data pada bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil koordinasi pemerintah desa pada pembangunan infrastruktur jalan belum sepenuhnya terpenuhi. Pada proses pengkoordinasian masih pemerintah tidak maksimal dalam melakukan kerjasama dan komunikasi dengan masyarakat. Begitupun dengan pembangunan jalannya masih adanya jalan yang belum di perbaiki, masyarakat masih resah mengenai pembangunan infrastruktur jalan yang masih terbengkalai.

Hasil koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong didasarkan pada 3 indikator koordinasi menurut Hasibuan yaitu kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi secara ringkas kesimpulan dari tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama

Pada indikator kerjasama dalam melakukan koordinasi pemerintah Desa Erecinnong sudah maksimal, dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya karena untuk melakukan pembangunan jalan perlu adanya campur tangan dari pihak lain turut membantu agar memaksimalkan hasil dari pembangunan jalan di Desa Erecinnong.

2. Kesatuan tindakan

Pada indikator kesatuan tindakan pemerintah Desa Erecinnong dalam upaya melakukan kesatuan sudah mempersiapkan segala hal dengan matang agar pembangunan infrastruktur jalan bisa berjalan dengan lancar

yang sudah dan masyarakat Desa Erecinnong telah bersatu untuk melakukan tindakan tapi belum maksimal, karena cuma sebagian saja masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan jalan di Desa Erecinnong.

3. Komunikasi

Pada indikator komunikasi tentang koordinasi pemerintah dengan masyarakat belum maksimal dikarenakan masih ada masyarakat belum mengetahui apa yang akan dilakukan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong. Sehingga koordinasi pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan maksimal.

4. Adapun pada kendala pada pembangunan infrastruktur jalan di Desa Erecinnong yaitu terbatasnya anggaran yang dimiliki dengan melihat APBDDES Erecinnong masih kurang sehingga secara aplikatif pembangunan infrastruktur jalan kurang lancar dan berujung pada tidak efektifnya hasil yang dicapai.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Erecinnong untuk keikutsertaan dalam masalah pembangunan jalan, hanya mengandalkan pemerintah saja. Jadi tidak terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat Desa Erecinnong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil analisis dari bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Erecinnong seharusnya lebih sigap dalam pembangunan infrastruktur jalan diharapkan memberikan perhatian penuh dalam

pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong khususnya dalam bidang jalan yang masih sangat jauh dari kata baik, misalnya dalam setiap diadakannya musrembang selalu membahas tentang koordinasi pembangunan jalan di Desa Erecinnong sehingga pembangunan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten, dan Perlu adanya transparansi pengelolaan anggaran dari pemerintah desa terhadap masyarakat agar masyarakat tau peruntukan anggaran yang telah dialokasikan sehingga tidak memicu adanya persepsi masyarakat yang negatif.

2. Pemerintah desa seharusnya memperbaiki *Hablumminnans* atau menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam program pemerintah karena peran masyarakat sangat penting dalam mendukung. Sebaliknya masyarakat pun begitu, ikut serta dalam program yang dilakukan pemerintah sehingga tidak adanya ketimpangan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan pusat statistik kabupaten bone dalam angka 2016. *Luas Desa Erecinnong Kabupaten Bone*.
- Badan pusat statistik kabupaten bone dalam angka 2016. *Kondisi di desa Erecinnong*.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Erecinnong,_Bontocani,_Bone.
- Edam, Nia Septiani. 2018. *Efektivitas Program Cerdas Command Center Sebagai Media Informasi Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi di Kantor Walikota Manado)*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi. Volume 1 No. 1 Tahun 2018
- Fajriana, Nur. 2014. *Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Muatang Kecamatan Pasar Belengkong Kabupaten Paser*. *Journal Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2014. Vol 2 No.2.
- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.
- Hadinus, S Eka. 2013. *Hubungan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa 2010- 2011 (Study Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)*. Universitas Riau
- Hasibuan. 2011. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan. H Malayu S.P 2016. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Indang Bangun Prasetyo Dan Muhammad Firdaus. *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia (Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan)*. Volume 2. Nomor 222. Tahun 2009.
- Kencana, Syafii Inu 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Laing, Everiady. 2019. *Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau*. jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com. Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Vol. 7 No. 2 Desember 2019

- Lumi, Bill A. 2020. *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Singsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*. 2020.
- Novi Maryaningsih Dkk. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan)*. Volume 17. Nomor 1. Juli 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Rohman, Sudi. 2017. *Koordinasi Camat Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Vol. 5 No.3.
- Sambiran, Sarah. 2017. *Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi. Vol. 2 No.2
- Siagian. 2011. *Pengertian Pembangunan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (1982). *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Susantono Dkk. *Revisi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Esensi Erlangga Group. 2010.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Uskono, Nikolaus. 2019. *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) (Penelitian Di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka)*. Jurnal Ilmu Adminitrasi Negara. Volume 1, Nomor 1, April 2019
- Yadi, Akhmad. 2007. *Manfaat pembangunan desa*. Bandung.
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

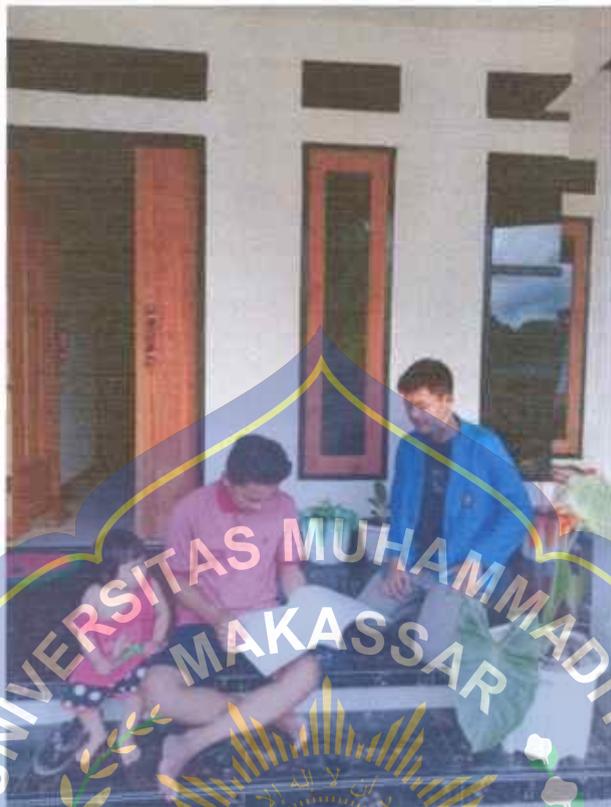


DOKUMENTASI PENELITIAN

Kantor Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone



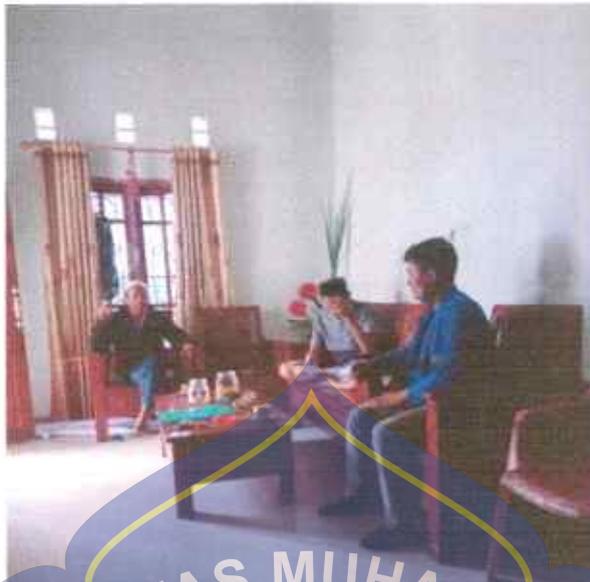
Wawancara dengan Bapak A. Abd Rahman selaku kepala desa Erecinnong pada tanggal 17 Mei 2021



Wawancara dengan Bapak Saenaldi selaku Sekretaris desa Erecinnong pada tanggal 17 Mei 2021



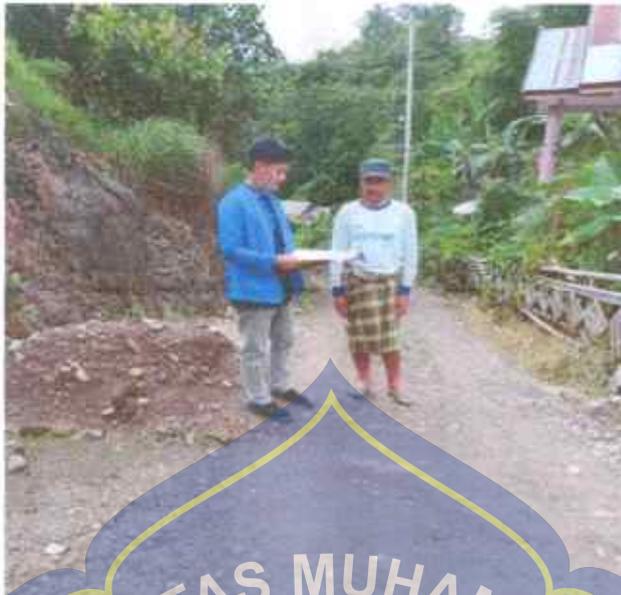
Wawancara dengan Bapak Andi Arifin, S.Pd selaku badan keuangan desa Erecinnong pada tanggal 17 Mei 2021



Wawancara dengan Bapak Syamsul Rijal dan Bapak Andi Sofyan selaku Pelaksana Teknis dan Wilayah Desa Erecinnong pada tanggal 17 Mei 2021



Wawancara dengan Bapak Andi Kamaruddin selaku masyarakat Desa Erecinnong pada tanggal 17 Mei 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

Wawancara dengan Bapak Ridwan selaku masyarakat Desa Erecinnong pada tanggal
17 Mei 2021

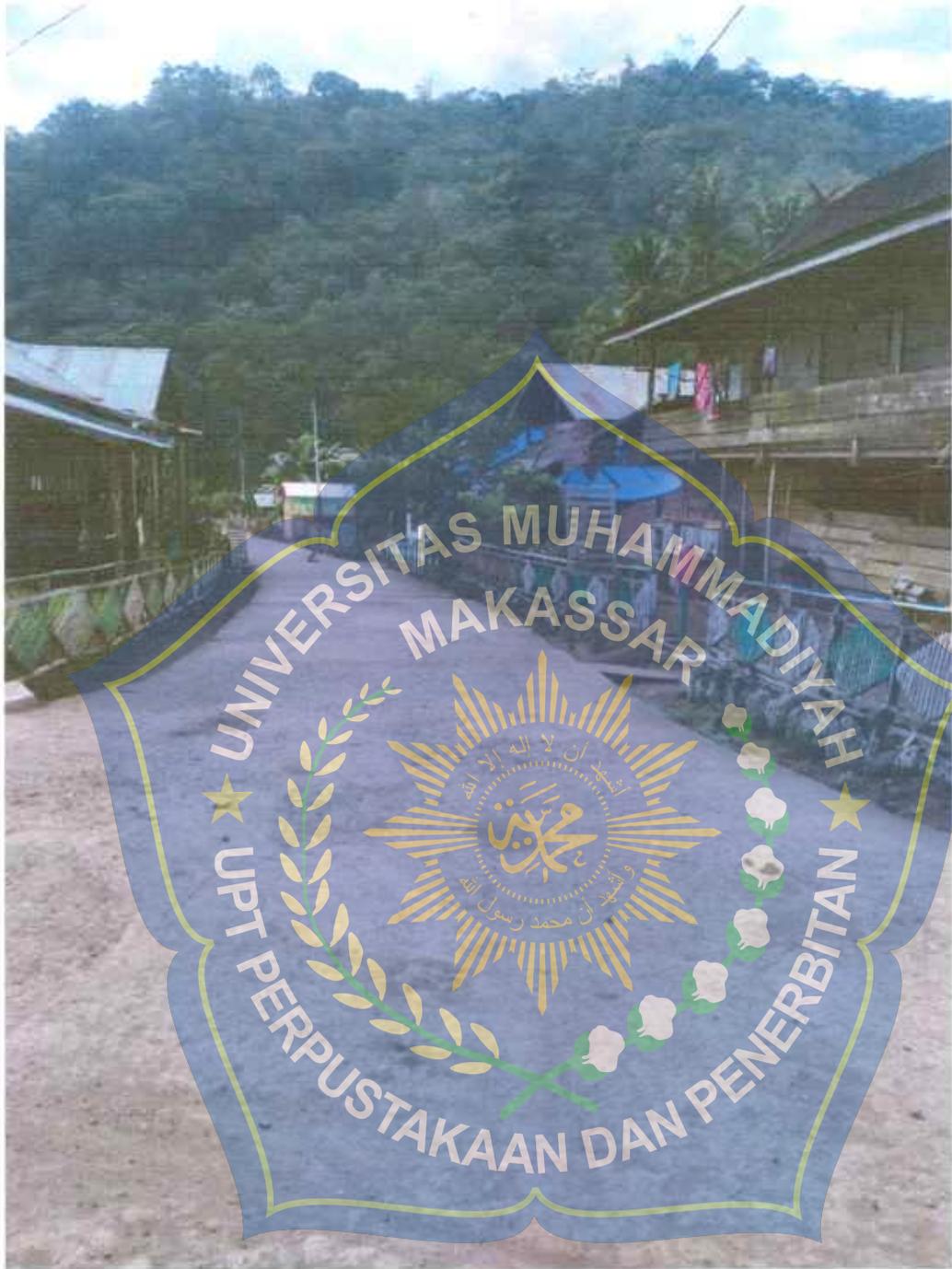


UPTI PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan Bapak Syahril selaku masyarakat Desa Erecinnong pada tanggal
17 Mei 2021

Kondisi jalan di Desa Erecinnong







Universitas
Muhammadiyah
Makassar

Keagamaan, Profesionalitas, Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Makassar Jalan Lae-Lae No. 105 Makassar 90221

Telp: (0411) 965 9211 / (0411) 965 988

E-mail: info@unismuh.ac.id

Website: <http://www.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 0925/A.3-II/VIII/1441/2020

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menyetujui pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara.

Nama : Risa Tanjung

Stambuk : 10564 11151 16

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Koordinasi Pemerintah Desa Islam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Erecunong di Kabupaten Soppo"

Pembimbing I : Dr. Abdul Masyar, M.Si

Pembimbing II : Dr. Amir Muaidin, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggung jawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditandatangani : di Makassar

Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

Dr. Khalid Malik, M.Si

NBM : 730727

Tembusan Kepada Yth.

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Ketertuhan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humanity

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Somba Oene No. 239 Telp. 840972 Fax. (0411) 865388 Makassar 90231 E-mail: depan@umidm.ac.id



Nomor : 1598/05/C.4-VIII/IV/40/2021
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq Kepala UPT P2T HKPMD Prov. Sul-Sel
di -
Makassar

04 Ramadhan 1442 H
16 April 2021 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0572/SP.A.1-VIII/IV/42/2021 tanggal 16 April 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RISAL TANJUNG
No. Stambuk : 105341121
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Kualitas Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ere'Innong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 April 2021 s.d 20 Juni 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu / Bismillah katirraa

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13578/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1596/05/C.4-VIII/IV/40/2021 tanggal 16 April 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : RISAL TAHJUNG
Nomor Pribadi : 10521115116
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sa. Alauddin Nasir, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di lingkungan instansi tersebut dengan menyerahkan skripsi, dengan judul:

**KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA
DREKEMONGO KECAMATAN BENTONG KABUPATEN BONE**

Yang akan dilaksanakan dan : Tgl. 20 April s.d. 27 Juni 2021

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di bawah ini surat izin penelitian. Dokumen yang dilampirkan yaitu surat elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode. Demikian surat izin penelitian ini diterbitkan sebagai acuan sebagaimana mestinya.

Makassar, Sulawesi Selatan
tanggal 20 April 2021

A.A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Esayisan Perizinan Terpadu

Dr. JAYATI NAS, S.Sos., M.Hi
Pangkat : Pembina Tk.1
Np. 19.10501.100003.1.001

Diterima di:
1. Kepala LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
2. Peneliti

Jalur PTSP online



Jl. Bugengwije No.5 Telp. (0411) 4410777 Fax. (0411) 448036
Website : <http://dinas.makassar.go.id> Email : ptsp@dm.makassar.go.id
Makassar 92231





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.305/1P/DPMP/TSP/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kiranya

Nama : **RISAL TANJUNG**

NIP/Nim (Nomor Pokok) : 105641115116

Jenis Kelamin : **Laki-Laki**

Alamat : **Desa Cerrana Kecamatan**

Pekerjaan : **Mahasiswa Unismuh Makassar**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**"KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
 DI DESA ERECIANNONG KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE"**

Lamanya Penelitian : 03 Mei 2021 s/d 20 Juni 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Ericinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone
2. Mengetahui semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyanggah Adat Istiadat setempat
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang diberikan
4. Menyediakan (1/satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila mana pemegangnya telah ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 03 Mei 2021

Disetujui

A. HERMAN SAMPARA, SH/MH

Jabatan : Pembina Utama Muda
 NIP : 19620724 199003 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Bone di Watampone
2. Camat Bontocani Kab. Bone di Kahu
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone
4. Kepala Desa Ericinnong Kec. Bontocani di Ericinnong
5. Ansip



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN BONTOCANI
DESA ERE CINNONG

Alamat : Dusun Altekang Desa Ere Cinnong Kec. Bontocani Kab. Bone Kode Pos 92768

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 670/130/DEC/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyetujui dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RISAL TANJUNG
 No. Stambuk : 105641115116
 Tempat/Tanggal Lahir : JARAMELE, 22 JULI 1995
 Alamat : DESA ERE CINNONG
 Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Universitas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengumpulan data pemerintah Desa Ere Cinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA ERE CINNONG KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE"**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ere Cinnong, 17 Mei 2021

Desa Ere Cinnong



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAKASSAR
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Risal Tanjung
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	15%	15 %
2	Bab 2	18%	25 %
3	Bab 3	15%	15 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %

Dinyatakan telah **Lulus** cek plagiat yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Makassar, 24 Agustus 2021

Pemeriksa,

Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP
NBM. 137 4895

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 103 1102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



RISAL TANJUNG, Dilahirkan di Kabupaten Bone tepatnya di Kelurahan Cenrana Kecamatan Kahu pada hari Sabtu 22 Juli 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Abdul Rasyid, S.IP dan Hamsinah, S.Ag. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Mis Cenrana pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 1 Kahu dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kahu pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2016 kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **"Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone"**.